

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012**

### *FINANCIAL PERFORMANCE ANALISYS OF KLATEN REGENCY'S REVENUE AND EXPENDITURE IN 2008-2012*

Oleh: Bahrun Assidiqi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

bahrun.assidiqi@yahoo.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten periode 2008-2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten secara umum baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 12,13%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 5,03% (rendah), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 90,44%, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum Rasio Efektifitas rata-rata 103,82% dan Rasio Efisiensi rata-rata 12,33%, Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0,23%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, APBD

#### **Abstract**

*This research aims to determine the financial performance of Klaten Regency's Revenue and Expenditure in 2008-2012. Documentation method used as data collection technique in this research to gather information needed. Secondary data used in the form of Fiscal Budget Realization of Klaten District's Government report in the year of 2008-2012. The result showed that (1) in general Financial Revenue performance of Klaten Regency can be said good. This is evidenced by (a) Variance of Regional Income average above 100%, (b) Regional Income Growth average (positive) 12.13%, (c) Financial regional income ratio by degree of decentralization showed an average of 5.03% (low), Regions Financial Dependence ratio is relatively high average of 90.44%, Effectiveness and Efficiency ratio of the Regional Tax, in general Effectiveness Ratio 103.82% on average and an average Efficiency Ratio of 12.33%. Degree of Regional Enterprise contribution achieve an average rate of 0.23%. (2) Financial Expenditure performance of Klaten Regency is generally good. This is evidenced by Variance Expenditure on average below 100%, (b) Expenditure Growth grew 11.00% on average, (c) Expenditure Harmony can be said that the Klaten Regency allocates the most budget for operating expenditure is on average 90.33%, compared with an average capital expenditure is 9.53%, (d) Efficiency expenditure showed an average below 100%.*

*Keywords: Financial Performance, Revenue Budget, Expenditure Budget, Revenue and Expenditure Budget*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi

kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Mardiasmo, 2004:182).

Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan incremental budget maka seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kabupaten Klaten adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih saja kurang baik. Hal ini ditunjukkan membengkaknya anggaran untuk pegawai. Pada tahun 2011 anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Klaten mencapai 70% dari total belanja tahun 2011 (sumber: [www.solopos.com](http://www.solopos.com)). Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada pemerintahan Kabupaten Klaten. Ditambah lagi Kabupaten Klaten masih menggunakan *incremental budget* dalam penyusunan APBD, sementara itu cara seperti ini sudah sedikit ketinggalan zaman dan mungkin tidak relevan lagi dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan

instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-12 bold, rata kiri. Sebagai contoh dapat dilihat berikut.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan mengambil data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2014

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, oleh karena itu subjek pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Klaten tahun 2008-2012

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan entitas pada suatu periode

tertentu dan diukur dengan indikator tertentu yang disusun berdasarkan basis akrual guna mengukur suatu keberhasilan entitas. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2008-2012 dan data biaya pemungutan pajak tahun 2008-

### **Teknik Analisis Data**

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran dapat dilakukan Analisis Pendapatan Daerah dengan cara :

##### 1) Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010).

Analisis Varians

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

##### 2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan secara positif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan secara negatif dikatakan Kinerja Keuangan

Pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2010).

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Pend. Tahun } t \\ & = \frac{\text{Pend. Tahun } t - \text{Pend. Tahun } (t - 1)}{\text{Pend. Tahun } (t - 1)} \times 100\% \end{aligned}$$

### 3) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

#### a) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Menurut artikel yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2011), jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.

#### Derajat Desentralisasi

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2010).

Menurut Kementerian Keuangan (2011), jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah.

#### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### c) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio Efektivitas Pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, sedang Rasio Efisiensi Pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Data biaya pemungutan pajak dapat diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) (Mahmudi, 2010).

#### Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Pend. Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### Rasio Efisiensi Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### d) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah

(Mahmudi, 2010). Jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0% maka dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

$$\begin{aligned} & \text{Derajat Kontribusi BUMD} \\ & = \frac{\text{Pend. Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

#### b. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dengan cara :

##### 1) Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis Varians Belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Belanja dinilai baik (Mahmudi, 2010).

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

##### 2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan

tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendalai pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t \\ & = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \times 100\% \end{aligned}$$

##### 3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah merupakan analisis di mana titik fokus analisis berada pada 3 fungsi utama anggaran, yaitu sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis Keserasian Belanja Daerah meliputi:

##### a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi Total Belanja Daerah, yaitu antara 60-90 persen (Mahmudi, 2010).

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} \\ & = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \end{aligned}$$

b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2010).

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio dalam Analisis Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010).

Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat menjawab keseluruhan dari pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2008-2012 yang mencapai angka rata-rata 100,89%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai 101,7%, sedang persentase terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 98,46%.
2. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah secara umum mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan positif yaitu 12,13%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai angka 28,67%, sedang pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,78%.
3. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah memiliki beberapa hasil. Berdasarkan Derajat Desentralisasi secara umum dapat dikatakan rendah. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata Derajat Desentralisasi mencapai 5,03%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 5,61%, sedang persentase terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 3,93%. Berdasarkan Rasio

Ketergantungan Keuangan Daerah, secara umum dapat dikatakan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata di atas 50% yaitu 90,44%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 93,74%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 83,95%. Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum dapat dikatakan efektif tetapi belum efisien. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata rasio mencapai 103,82% untuk efektifitas dan 12,33% untuk efisiensi. Persentase tertinggi untuk rasio efektifitas terjadi pada tahun 2012 yaitu 114,88% dan rasio efisiensi terjadi pada tahun 2009 yaitu 16,92%, sedang persentase terendah untuk rasio efektifitas terjadi pada tahun 2010 yaitu 92,46% dan rasio efisiensi terjadi pada tahun 2012 yaitu 10,00%. Berdasarkan Derajat Kontribusi BUMD, secara umum dapat dikatakan telah berkontribusi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata mencapai 0,23%. Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,28%, sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 0,19%.

4. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Varians Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan baik. Hal

ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi anggaran belanja Kabupaten Klaten sebesar 93,48%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 96,82%, sedang persentase terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 91,53%.

5. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata pertumbuhan mencapai 11%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 26,09%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu -1,90%.

6. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Keserasian Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen yang dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata sebesar 90,33% untuk Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan 9,57% untuk Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 96,07% dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja tertinggi terjadi

pada tahun 2008 yaitu 14,45%, sedangkan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 84,42% dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 3,84%.

7. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka di atas 100% atau tidak melebihi anggaran belanja.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini

- a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.

- 1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target

realisasi APBD Kabupaten Klaten sebesar 100,89%.

- 2) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 12,13%.
- 3) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Klaten dapat dikatakan rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 5,03%. Dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Klaten selama 2008-2012 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih tergantung kepada pemerintah pusat ditunjukkan dengan angka ketergantungan mencapai 90,44%. Tingkat efektifitas pajak daerah mencapai angka rata-rata 103,82% , sehingga dikatakan efektif. Rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah mencapai angka di atas 10%, sehingga penggunaan biaya pemungutan pajak dikatakan belum efisien. BUMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki kontribusi terhadap

pendapatan daerah Kabupaten Klaten, ditunjukkan dengan Derajat Kontribusi BUMD yang setiap tahunnya lebih dari 0 %.

b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

- 1) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Varians Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kabupaten Klaten sebesar 93,48%.
- 2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 11%.
- 3) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2008-2012 rata-

rata Belanja Operasi sebesar 90,33% sedang Belanja Modal sebesar 9,57%.

- 4) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan efisiensi belanja.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

#### **Bagi Pemkab Klaten**

- 1) Kabupaten Klaten perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Klaten. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD. Ada juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam

pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.

- 2) Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Pemerintahan Kabupaten Klaten, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### **Bagi peneliti selanjutnya**

- 1) Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2008-2012. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemda Klaten.
- 2) Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Solopos. (2012). “Belanja Pegawai Presentase Belanja Pegawai di Klaten Nomor 1 di Jateng”. Diambil dari <http://www.solopos.com/2012/04/12/belanja-pegawai-presentase-belanja-pegawai-di-klaten-nomor-1-di-jateng-177867> (Diakses pada tanggal 28 Januari 2014).